

Judul : Wacana pilkada melalui DPRD menuai penolakan
Tanggal : Selasa, 30 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

SISTEM KEPEMILUAN

Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Penolakan

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah Revisi Undang-Undang Pemilu telah resmi masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 dan akan dibahas di Komisi II DPR, sejumlah partai besar kembali mewacanakan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Wacana ini pun memperoleh penolakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pemenang Pemilu 2024, serta kalangan ahli politik dan hukum tata negara.

Wacana yang mendukung pilkada lewat DPRD itu, di antaranya, disuarakan oleh Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Menanggapi wacana itu, bukan hanya PDI-P yang menolak, melainkan juga partai kecil, seperti Partai Buruh.

Kalangan ahli politik dan hukum tata negara juga menolak pilkada lewat DPRD karena dinilai hanya akan menguntungkan partai-partai besar dan menghambat demokrasi lokal. Jika dilaksanakan, pilkada lewat DPRD berpotensi menjadi pintu awal perusakan kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menyatakan, Gerindra memandang bahwa Indonesia harus berani untuk mengubah sistem pilkada ketika sistem itu memiliki banyak kekurangan. Misalnya, ongkos politik tinggi yang berdampak pada politik uang.

"Inilah yang kemudian, kalau kajian di kami internal Partai Gerindra, kami memang terus terang salah satu yang mengusulkan atau berpendapat bahwa kami berkecenderungan untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah itu melalui mekanisme di DPRD," kata Prasetyo, Senin (29/12/2025).

Saat ditanya sebagai Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo tidak memungkiti, diskursus mengenai pilkada oleh DPRD sampai ke Istana. Wacana itu memang tidak dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan para menteri dalam kon-

teks koordinasi kabinet. Namun, ia tidak menyangkal bahwa hal tersebut dibicarakan dalam konteks pembicaraan antarpimpinan parpol.

Kalau pemerintah, ya, pada dasarnya, kan, kita mendengarkan seluruh aspirasi dan pendapat," ujarnya saat ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma.

Wacana pilkada lewat DPRD disuarakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono. Dalam keterangannya, Minggu (28/12), Sugiono menyampaikan, "Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pilkada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, ataupun di tingkat gubernur."

Gerindra beralasan, pilkada melalui DPRD bisa lebih efisien, mulai dari proses atau waktu peninjauan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik, hingga pemungutan suara.

Sugiono menyebut pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada hampir Rp 7 triliun. Angka itu terus meningkat hingga pada 2024 dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai lebih dari Rp 37 triliun.

"Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif," katanya.

Sugiono juga menyampaikan, kan, ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah juga tergolong mahal. Hal ini kerap menjadi hambatan bagi sosok-sosok yang kompeten untuk menjadi kepala daerah.

Menurut Sugiono, pilkada lewat DPRD tidak akan menghilangkan esensi demokrasi. Sebab, calon kepala dipilih oleh anggota legislatif yang juga dipilih oleh rakyat dalam pemilu. Nantinya, masyarakat juga tetap harus mendapatkan akses untuk mengawal aspirasi yang disuarakan lewat perwakilan mereka di DPRD.

Pada 23 Juli 2025, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sudah lebih dulu melontarkan usulan agar pilkada

dilakukan melalui DPRD. Alasannya untuk menekan mahal-mahalnya ongkos politik dan maraknya praktik uang dalam pilkada langsung.

Pada 5 Desember 2025, dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, giliran Ketua Umum Golkar Bahilil Lahadalia secara terbuka mengusulkan pilkada lewat DPRD di hadapan Presiden Prabowo.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengungkapkan, PKB telah mengusulkan skema itu sebelum Pilkada 2024 digelar. "Meningkat biaya pilkada yang sangat besar dan mahal, saya rasa memungkinkan untuk di jalankan dan menjadi bagian dari perbaikan sistem pemilu," ujar Daniel.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengungkapkan, Golkar telah membentuk tim kajian politik yang bekerja sekitar 1,5 tahun untuk mengkaji sistem pemilu, partai politik, hingga pilkada. Untuk pilkada, tim kajian mengusulkan beberapa opsi, baik yang pilkada langsung maupun yang lewat DPRD.

Namun, seiring berkembangnya aspirasi dari semua Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Partai Golkar provinsi, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas)-I Partai Golkar akhir pekan lalu merekomendasikan agar pelaksanaan pilkada dilakukan melalui DPRD, baik untuk pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota, dengan sejumlah catatan.

Siapkan konsep baru

Doli, yang juga anggota Komisi II DPR, menjelaskan, tim kajian politik DPP Golkar telah menyiapkan konsep baru apabila opsi pilkada melalui DPRD dipilih. Konsep tersebut dirancang untuk mengakomodasi dua prinsip sekaligus, yakni prinsip demokrasi atau pelibatan publik serta prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas dari praktik moral hazard pemilu, seperti

Wacana pilkada melalui DPRD sebagai sinyal nyata kemunduran demokrasi.

Yance Ardiana

transaksi politik, politik uang, dan jual beli suara.

Meski pemilihan akhir dilakukan oleh anggota DPRD, menurut Doli, tahapan-tahapan sebelumnya tetap dapat melibatkan publik. Salah satunya, pemilihan atau seleksi bakal calon dilakukan melalui tim panel yang dapat melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Sementara itu, PAN yang sebelumnya menyatakan masih mengkaji kini telah mengambil sikap. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan, PAN setuju pilkada dilaksanakan secara tidak langsung atau melalui DPRD.

Meski demikian, PAN mengajukan sejumlah catatan. Menurut Viva, semua partai politik harus bersikap secara bulat agar pelaksanaan pilkada lewat DPRD tidak dijadikan ajang manuver politik dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada.

Viva juga mengingatkan agar perubahan mekanisme pilkada tidak memicu pro dan kontra yang tajam dan meluas di publik. Pasalnya, setiap pembahasan UU Pilkada kerap memicu gelombang demonstrasi di sejumlah daerah.

Dari sisi hukum tata negara, Viva berpandangan, UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur apakah pilkada harus dilakukan secara langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Keduanya, kata Viva, sama-sama konstitusional sepanjang dijalankan secara demokratis. Mahkamah Konstitusi (MK) pun telah menegaskan bahwa frasa dipilih

secara demokratis merupakan *open legal policy* yang berada dalam kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah.

Membengkokkan aspirasi

PDI-P menyatakan sejak awal konsisten menolak pilkada tidak langsung. Sikap itu sudah diambil jauh sebelum wacana serupa kembali menguat hari ini. Pada 2014, saat pembahasan RUU Pilkada berlangsung alot, PDI-P berada di barisan partai yang mempertahankan pilkada langsung di tengah mayoritas fraksi DPR yang mendorong pilkada melalui DPRD. Kala itu, PDI-P bersama PKB dan Partai Hanura berdiri di sisi pilkada langsung.

Ketua DPP PDI-P, Said Abdillah menyampaikan, wacana menggeser mekanisme pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa dan harus di-kaji secara mendalam.

Esensi pilkada langsung, kata Said, terletak pada keterlibatan langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya di daerah. Jika mekanisme itu digantikan dengan pemilihan oleh DPRD, kedaulatan memilih kepala daerah dipindahkan ke wakil rakyat. "Langkah ini berpotensi membengkokkan aspirasi rakyat di daerah karena kepentingan DPRD dan pilihan rakyat atas figur kepala daerah bisa saja berbeda," ucapnya.

Untuk mengurai persoalan mahalnya ongkos pilkada langsung, Said berpandangan, solusi yang lebih tepat adalah memperbaiki regulasi dan penegakan hukum, terutama terkait politik uang. Selama ini, katanya, biaya pilkada langsung kerap dikecilkan, tetapi pembenahan sistem penegakan hukumnya tidak berjalan seiring.

Oleh karena itu, Said mendorong penguatan *criminal justice system* dalam penanganan pelanggaran pemilu yang didominasi praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Said, perlu diperkuat, termasuk dengan ke-

wenangan penyidikan yang independen atau melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara khusus dalam penanganan politik uang. Sanksi pidana, baik bagi pemberi maupun penerima, harus diperberat.

Wakil Presiden Partai Buruh Said Salahuddin menyatakan, mayoritas partai yang tergabung dalam Gerakan Kedua-latan Suara Rakyat (GKSRR) menolak pilkada melalui DPRD. GKSRR beranggotakan delapan partai nonparlemen, yakni Partai Buruh, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nasional, Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya.

Hanya tiga partai nonparlemen yang tidak bergabung dalam GKSRR, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Garuda.

Mematikan partai kecil

Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, A. Bakir Ihsan, berpandangan, jika kepala daerah dipilih melalui DPRD, keuntungan terbesar akan dinikmati partai-partai besar. Daya tawar politik mereka, termasuk dalam berbagai bentuk insentif, akan jauh lebih kuat. Kemungkinan menjadi lebih tenik karena bertumpu pada penghitungan kursi dan terpusat pada instruksi pimpinan partai.

Menurut Bakir, dampak dari skema itu tidak hanya menghambat demokratisasi lokal, tetapi juga mematikan ruang hidup partai-partai kecil. Tragisnya, kata Bakir, kekuasaan justru akan semakin terkonsentrasi di tangan partai besar, tetapi dalam kondisi yang rapuh dan tidak terlembagakan.

"Partai menjadi terpersonalisasi pada sosok tertentu, bukan pada struktur dan ideologi, bahkan cenderung berpolitik kekeluargaan, bukan berbasis kemampuan," ujarnya.

Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Yance Arizona, juga menyebut wa-

cana pilkada melalui DPRD sebagai sinyal nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Jika direalisasikan, langkah tersebut berpotensi menjadi pintu awal perusakan kelembagaan demokrasi yang telah dibangun sejak era reformasi.

Yance menilai, dampak negatif pengambilan pilkada ke DPRD sangat besar. Dari sisi politik, skema itu akan menghilangkan hak warga negara untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. "Dalam 20 tahun terakhir, banyak pemimpin daerah yang lahir dari proses pemilihan langsung oleh rakyat," katanya.

Terkait alasan penghematan anggaran dan pemutusan praktik politik uang, Yance menilai argumen tersebut keliru sasaran. Efisiensi, menurut Yance, semestinya dilakukan pada belanja politik dan birokrasi, seperti perjalanan dinas atau rapat rapat penyelenggara pemilu. Anggaran yang dihambat justru perlu dialihkan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang.

Daripada mengubah sistem pilkada, Yance menilai pemerintah seharusnya memperbaiki efisiensi anggaran serta meniadakan tugas pelaku politik uang melalui lembaga-lembaga yang telah ada. Ia juga menekankan pentingnya tekanan publik untuk menolak perubahan sistem yang dinilai hanya menjadi dalih menghilangkan suara rakyat dan memusatkan kekuasaan.

Yance menambahkan, kondisi politik saat ini sudah diwarnai persoalan netralitas aparat negara, yang dalam sejumlah kasus justru terlibat dalam kampanye atau mengondisikan calon tertentu. Situasi tersebut, menurut Yance, akan semakin bermasalah jika pilkada tidak langsung diberlakukan.

"Ke depan, akan sangat mudah bagi pemerintah menentukan siapa yang menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, rakyat perlu bersuara," ujarnya.

(NIA BOW)